



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
BPKAD TAHUN 2022**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SINTANG**

Jalan. M. Saad Sintang 78611 Kalimantan Barat  
Telp. (0565) 21389 Fax (0565) 21208

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan YME atas segala limpahan berkah dan rahmatNya, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2022 dapat diselesaikan sebagai perwujudan ditetapkannya capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan program selama satu tahun.

Selanjutnya rencana kinerja tahunan ini akan dijadikan pedoman atau acuan perencanaan dan pelaksana atas seluruh tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dimungkinkan untuk direvisi kembali sesuai dengan perubahan lingkungan strategis.

Penyajian dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini tidaklah sempurna, namun kami senantiasa akan terus berupaya melakukan penyempurnaan demi terwujudnya akuntabilitas kinerja organisasi yang telah dibangun di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang.

Rencana Kinerja Tahunan 2022 merupakan komitmen kinerja bersama bagi jajaran pimpinan dan aparatur di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang, oleh karena itu diharapkan dalam implementasi program dan kegiatan tentunya harus selalu mengacu pada dokumen RKT ini.

Sintang, 31 Oktober 2022

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN SINTANG



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	1
C. Keterkaitan Renstra, RKT dan LKjIP .....	2
D. Gambaran Umum BPKAD Kabupaten Sintang .....	2
BAB II : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .....	10
A. Visi .....	10
B. Misi .....	10
C. Tujuan .....	11
BAB III : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN ..	12
A. Kebijakan .....	12
B. Strategi .....	13
C. Program dan Kegiatan .....	14
Lampiran Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang.....	5



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang, yang kemudian merupakan acuan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk memberikan target (*quantitative objectives*) tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan OPD untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sedangkan teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### B. Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini bertujuan untuk memberikan acuan dan landasan serta arah bagi perencanaan dan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi pada fungsi-fungsi yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan adalah :

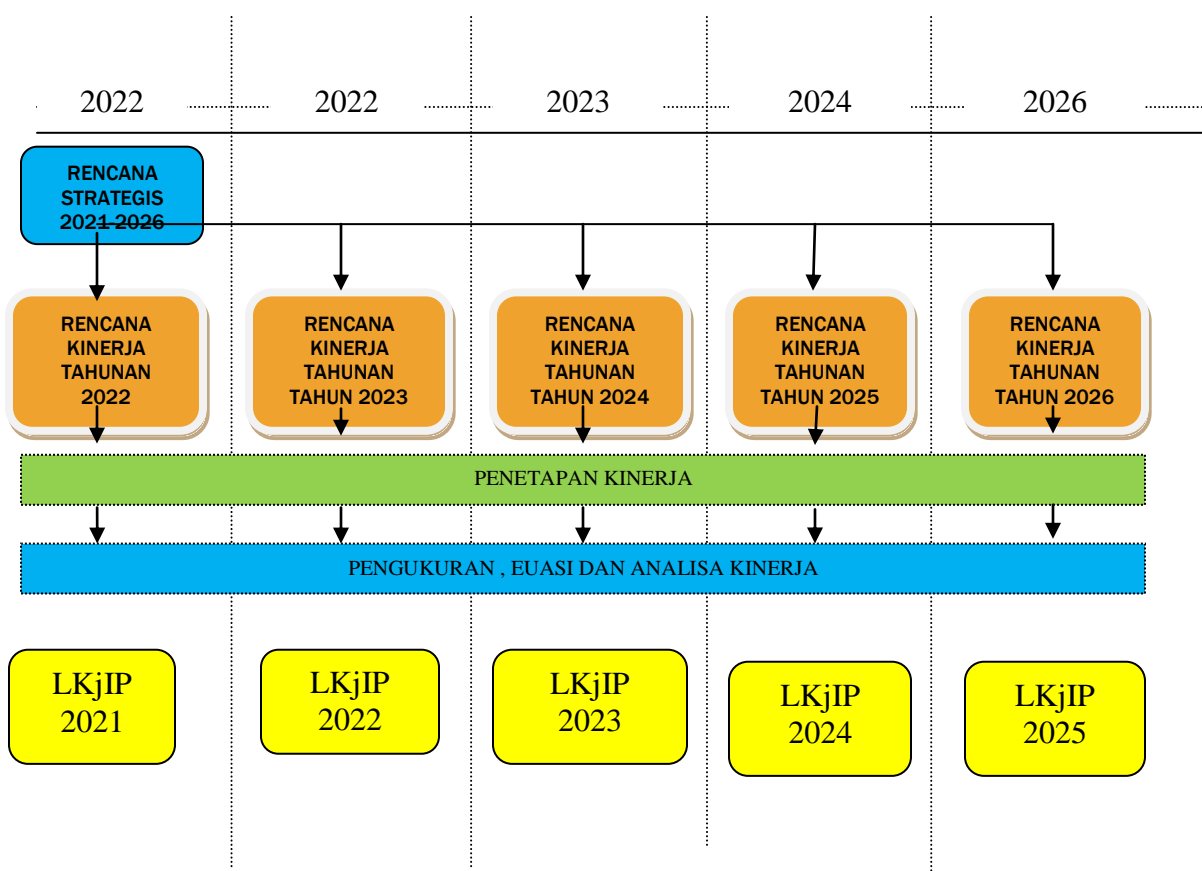
1. Sebagai dasar membuat rencana operasional kegiatan.
2. Komitmen pimpinan untuk menyediakan sumber daya.
3. Digunakan untuk proses penganggaran.
4. Digunakan untuk "*service agreement*" atau komitmen kinerja tahunan ataupun "*performance agreement*" antara legislatif dan eksekutif
5. Digunakan untuk pemantauan program/kegiatan.



### C. Keterkaitan Renstra, RKT dan LKjIP

Salah satu tahapan dalam melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada setiap awal tahun anggaran. Pelaksanaan rencana tersebut dipertanggungjawabkan melalui LKjIP, paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Sedangkan Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra), yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan, maka secara ringkas keterkaitan Renstra, Renja, dan LKjIP dapat digambarkan sebagai berikut:

#### KERANGKA KERJA SISTEM AKUNTABILITAS



### D. Gambaran Umum BPKAD Kabupaten Sintang

#### 1. Kedudukan

Pemerintah Kabupaten Sintang telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan sebagai landasan operasional mengacu pada Peraturan Bupati Sintang Nomor 147 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Sintang. Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Sintang tersebut, BPKAD Kabupaten Sintang adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang mempunyai tugas pokok di bidang Pengelola keuangan dan aset daerah. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala BPKAD mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- c. penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pengelola administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan arsip BPKAD;
- e. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. pelaksanaan pengelola belanja dan pembiayaan daerah
- g. pelaksanaan sistem pengendalian internal;
- h. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- i. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- j. pembinaan Badan Layanan Umum Daerah;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi**

### **a. Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 147 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang, tugas pokok BPKAD adalah melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang Pengelola keuangan dan aset daerah.

### **b. Fungsi**

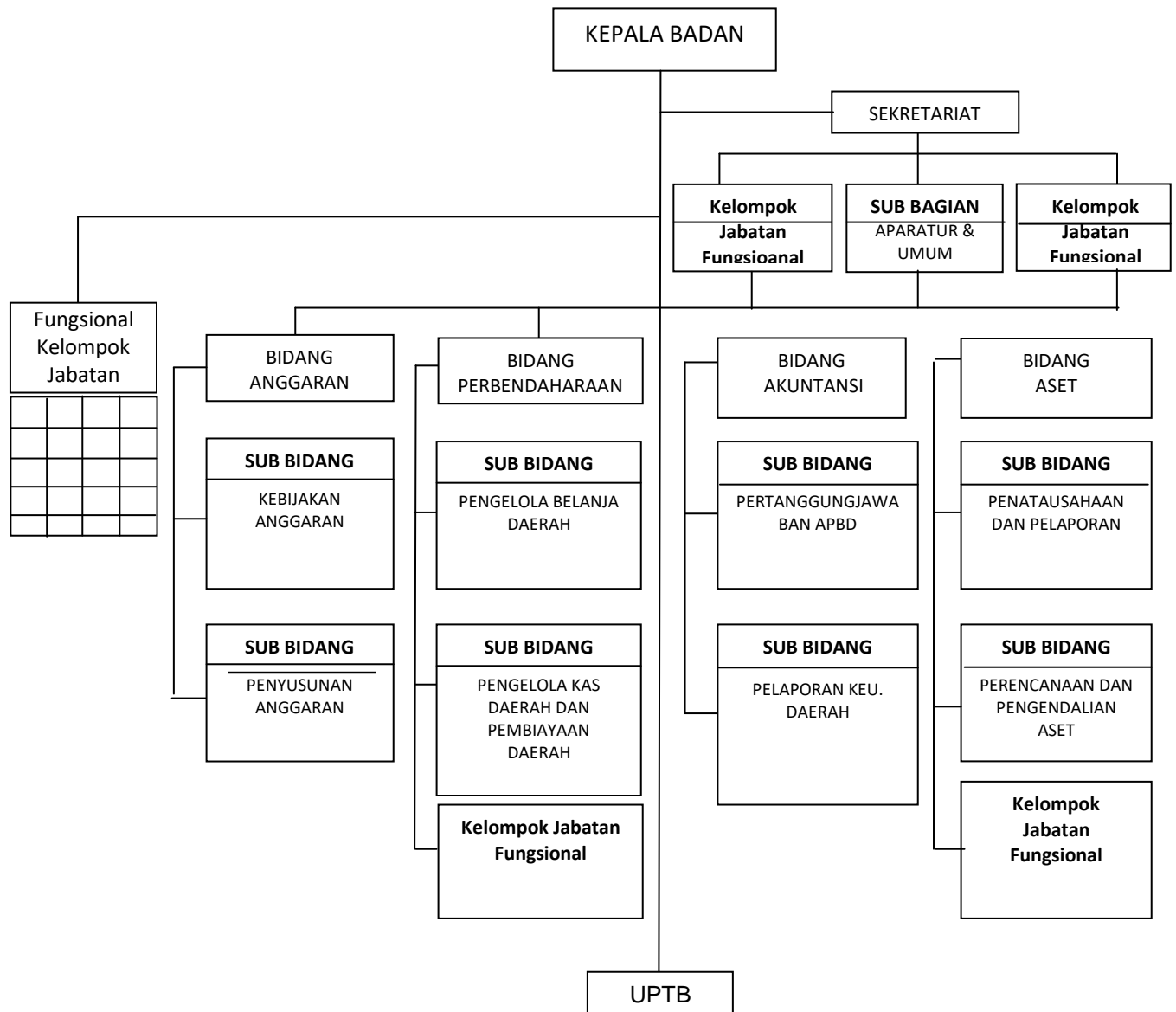
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, BPKAD Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - c. penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - d. pengelola administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan arsip BPKAD;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - f. pelaksanaan pengelolaan belanja dan pembiayaan daerah
  - g. pelaksanaan Sistem pengendalian internal;
  - h. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang;
  - i. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - j. pembinaan Badan Layanan Umum Daerah; dan
  - k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Struktur Organisasi ( sebagaimana terlampir ).



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH ( BPKAD )  
 KABUPATEN SINTANG**





d. Hal – hal lain yang berpengaruh

Ada beberapa hal yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang merupakan lingkungan strategis diantaranya :

1. Sumber Daya Manusia

BPKAD Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung 43 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel I  
Komposisi Pegawai Menurut Kepangkatan/Golongan  
(Posisi Per Desember 2022)

NO	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	5 Orang
2	Golongan III	30 Orang
3	Golongan II	8 Orang
4	Golongan I	-
	<b>Jumlah.....</b>	43 Orang

Tabel II  
Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan Formal  
(Posisi Per Desember 2022)

NO	PENDIDIKAN	Jumlah
1	S2	12 Orang
2	S1	18 Orang
3	D3	1 Orang
4	SLTA	12 Orang
5	SLTP	-
6	SD	-
	<b>Jumlah.....</b>	43 Orang

Tabel III  
Komposisi Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklatpim  
(Posisi Per Desember 2022)

NO	DIKLATPIM	Jumlah
1	Diklatpim II	1 Orang
2	Diklatpim III	2 Orang
3	Diklatpim IV	4 Orang
	<b>Jumlah.....</b>	7 Orang

Tabel IV  
Komposisi Yang Menduduki Jabatan Struktural/Eselon  
(Posisi Per Desember 2022)

NO	Eselon	Jumlah
1	ESELON II	1 Orang
2	ESELON III	5 Orang
3	ESELON IV	13 Orang
	<b>Jumlah.....</b>	<b>18 Orang</b>

Tabel V  
Rekap Komposisi Eselon, Pendidikan dan Golongan  
(Posisi Per Desember 2022)

Eselon/Non Eselon	Pendidikan						Golongan			
	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	I
II	1	-	-	-	-	-	1	-	6	-
III	4	1	-	-	-	-	5	1	-	-
IV	5	8	-	0	-	-	-	13	-	-
<b>Sub Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Non Eselon	2	9	1	11	-	-	-	17	7	-
<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>31</b>	<b>7</b>	<b>-</b>

## 2. Sarana dan Prasarana

Adapun kondisi sarana dan prasarana yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel VI  
Sarana dan Prasarana BPKAD  
(Posisi Per Desember 2022)

No	Uraian	Jumlah	Satuan
1	2	3	4
1	Gedung Kantor	2	Buah
2	Gedung Arsip (Gudang)	1	Buah
3	Rumah Jaga/pos	1	Buah
4	Rumah Jaga/tempat tinggal	1	Buah
5	Kantin	1	Unit
6	Rumah genset	1	Buah
7	Gudang aset	1	Buah
8	Mushola/rumah ibadah	1	Buah
9	Menara Air+Sumur Bor	1	Buah
10	Garasi Mobil/motor	1	Buah

11	Mesin Gensit 100 KVA	1	Buah
12	Kendaraan Roda Empat	8	Unit
13	Kendaraan Roda Dua	19	Unit
14	Kendaraan roda 3	1	Unit
15	Speed boat	1	Unit
16	Laptop	29	Unit
17	Note book	27	Unit
18	Komputer PC	68	Unit
19	Unit Power Supply (UPS)	47	Unit
20	Kamera film DSLR Nixon D.3200	1	Unit
21	Printer	78	Unit
22	Brankas	1	Unit
23	Filing kabinet	5	Unit
24	Camera Digital	4	Buah
25	Televisi	3	Buah
26	Telepon	2	Buah
27	Air Phone	2	Buah
28	Air Conditioner(AC)	48	Buah
29	Meja Rapat	10	Buah
30	Meja 1 Biro	13	Buah
31	Meja 1/2 Biro	16	Buah
32	Kursi Direksi	35	Buah
33	Kursi putar	17	Buah
34	Kursi rapat	83	Buah
35	Kursi besi metal	11	Buah
36	Kursi tamu	18	Buah
37	Lemari arsip kayu	14	Buah
38	Lemari arsip kaca	1	Buah
39	Rak arsip kayu	5	Buah
40	Rak besi metal	2	Buah
41	Mobil storage	3	Buah
42	Proyektor/infocus+layar	9	Buah
43	Lemari Es	1	Buah
44	Sound system	3	Unit
45	Alat penghancur kertas	4	Buah
46	Alat pemotong kertas	2	Buah
47	Mesin tik	4	Buah
48	Mesin penghitung uang	1	Buah

49	Mesin rumput	3	Buah
50	Racun api	5	Unit
51	Handy Talki	1	Buah
52	GPS	3	Buah
53	Faximili	1	Buah
54	CCTV	1	Unit
55	Absensi/Finger Print	2	Buah
56	Wireless	1	Unit
57	Horizontal Blind (Krag Kayu)/Tirai Kayu	8	Unit



## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

#### A. Visi dan Misi

##### A.1. Visi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan atau keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk diwujudkan. Visi pada umumnya digunakan sebagai inspirasi yang menumbuhkan semangat dan menggerakkan seluruh kemampuan *stakeholders* agar secara bersama dan sinergis membangun daerah. Visi pembangunan dalam dokumen RPJMD ini merupakan kondisi akhir daerah yang dikehendaki oleh *stakeholders* di Kabupaten Sintang dalam periode 2021-2026.

Dalam perumusannya, visi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan keinginan luhur rakyat Kabupaten Sintang untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, memperhatikan isu-isu strategis dalam lima tahun mendatang, serta dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 dengan Visi “KABUPATEN SINTANG MAJU, MANDIRI, dan SEJAHTERA”. Berdasarkan hal itu, maka Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELEGIOUS, DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2026”**

##### A.2 Misi

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.



2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
3. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
4. Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

## B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan misi. Sesuai dengan misi pembangunan Kabupaten Sintang yang ke enam yaitu : Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dapat dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD sebagai berikut :

Tabel VII

Keterkaitan Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4	5
1.	Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan	Profesionalisme Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Tingkat ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD dan Raperda perubahan APBD 2. Opini WTP dari BPK terhadap laporan keuangan daerah





## BAB III

### STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### A. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pemikiran konseptual, analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Dengan demikian, arah kebijakan akan menjadi penuntun terhadap program-program indikatif yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah.

Sesuai dengan misi pembangunan Kabupaten Sintang yang ke enam yaitu : Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dapat dijelaskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah BPKAD sebagai berikut :

Tabel VIII  
Keterkaitan Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah BPKAD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3		4
1.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan	Profesionalisme pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan Kemampuan Aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik	1. Menyusun APBD sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan. 2. Peningkatan kualitas





NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3		4
				pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan diperolehnya WTP. 3. Pengawasan internal, eksternal, dan fungsional dalam upaya pembinaan dan pencegahan tindak pidana korupsi

**B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA BPKAD TAHUN 2022**

Mewujudkan cita – cita melalui visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sintang, BPKAD Kabupaten Sintang selalu mempunyai target kinerja bahwa dalam pengelolaan keuangan dan aset setiap tahunnya harus lebih baik, penyelesaian laporan pertanggungjawaban dan penyampaian laporan keuangan OPD harus benar dan tepat waktu sehingga laporan keuangan daerahpun tepat waktu. Target kinerja dan sasaran BPKAD Kabupaten Sintang tahun 2022 dapat disajikan sebagai berikut :



Tabel IX  
Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja BPKAD Kabupaten Sintang  
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2019
1	2	3	4
1.	Profesionalisme pengelolaan keuangan daerah	1. Ditetapkannya APBD tepat waktu	Tepat Waktu
		2. Opini WTP dari BPK terhadap Laporan	WTP

### C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaan baik melalui APBN/APBD, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kinerja tahunan.

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada Tahun 2022 BPKAD melaksanakan program dan kegiatan yang mendapat alokasi pagu dari APBD sebesar Rp492.504.427.058 untuk 4 program dan 13 kegiatan 60 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

- KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- 1) Penyusunan Standar Harga.
- 2) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah
- 4) Pengamanan Barang Milik Daerah
- 5) Penilaian Barang Milik Daerah
- 6) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- 7) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.



8) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

- KEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH.
  - 1) Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban.
  - 2) Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran.
  - 3) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
  - 4) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
  - 5) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - 6) Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota.
- KEGIATAN KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH.
  - 1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah.
  - 2) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD.
  - 3) Penatausahaan Pembiayaan Daerah.
  - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).
  - 5) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait.
  - 6) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban.
  - 7) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.



- KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DEARAH.
    - 1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS.
    - 2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
    - 3) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD.
    - 4) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD.
    - 5) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD.
    - 6) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD.
    - 7) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
    - 8) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.
    - 9) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
  
  - KEGIATAN PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
    - 1) Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi.
    - 2) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.
    - 3) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
    - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
  - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
    - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
    - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
    - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
    - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.



5) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
  - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
  - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
  - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
  - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
  - 6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
  - 7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah.
  - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
  - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
  - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
  - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
  - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.



- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

#### 4. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- 1) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2022 disusun, untuk menjadi acuan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang dalam mengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2022.



**Tabel.3.1**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>PAGU</b>
1	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Pelayanan Informasi Publik	16.330.000
2	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.850.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.760.000
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.807.536.328
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	104.811.100
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	82.472.500
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.881.900
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.984.260
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	92.520.000
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.184.100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.766.378
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.363.410
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	193.583.700
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	95.905.500
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	45.485.000
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
	Pengadaan Mebel	8.103.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	148.060.660
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	436.008.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	636.792.500
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	102.480.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Opera	14.307.100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.926.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	
	<b>Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	95.865.680
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	66.986.312
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	157.798.260
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	49.454.000
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	34.388.800
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	130.119.800
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	510.085.640
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Da	597.009.248
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	994.307.220
	<b>Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	116.324.330
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	22.657.000
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	13.280.300
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan	96.279.000
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2	32.199.200
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Peng	314.106.700
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	150.464.500
	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	
	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	1.500.015.581
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	463.375.021.276
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4.516.464.950

	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	10.342.901.835
	<b>Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan	23.107.000
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan	39.703.400
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	36.778.450
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksana	123.223.740
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Dae	35.108.650
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah	22.553.850
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	313.510.000
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	145.473.200
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	
	<b>Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	
	Penyusunan Standar Harga	17.655.110
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	19.294.330
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	105.814.700
	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.088.004.750
	Penilaian Barang Milik Daerah	62.443.340
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	137.995.000
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	47.062.500
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	137.857.970
	<b>Total.....</b>	<b>492.504.427.058</b>